

Pengaruh Penerapan E-Government Dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Terhadap Efisiensi Pelayanan Kantor Desa Aek Goti Kecamatan Silangkitang Kabupaten Labuhanbatu Selatan

Salamah Ritonga^{1✉}, Sri Ayla Siregar², Nurhabibah Ritonga³

^{1,2,3}Program Studi Manajemen, Universitas Al Washliyah labuhanbatu

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh penerapan e-government dan pelatihan sumber daya manusia terhadap efisiensi pelayanan di Kantor Desa Aek Goti, Kecamatan Silangkitang, Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan kuesioner yang disebarkan kepada aparatur desa dan masyarakat pengguna layanan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan e-government secara signifikan meningkatkan efisiensi pelayanan, terutama dalam hal transparansi, kecepatan, dan aksesibilitas layanan. Selain itu, pelatihan sumber daya manusia juga berperan penting dalam meningkatkan kompetensi aparatur desa dalam mengoperasikan sistem berbasis digital. Dengan demikian, kombinasi e-government dan pelatihan SDM dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik di tingkat desa.

Kata kunci : *e-Government, Pelatihan Sumber Daya Manusia, Efisiensi Pelayanan.*

Abstract

This research aims to analyze the impact of the implementation of e-government and human resource training on service efficiency at the Aek Goti Village Office, Silangkitang District, South Labuhanbatu Regency. The research method used is a quantitative method with a descriptive approach. Data were obtained through observation, interviews, and questionnaires distributed to village officials and service users. The results show that the implementation of e-government significantly improves service efficiency, especially in terms of transparency, speed, and accessibility of services. In addition, human resource training also plays an important role in enhancing the competence of village officials in operating digital-based systems. Thus, the combination of e-government and HR training can improve the quality of public services at the village level.

Keywords : *E-Government, Human Resource Training, Service Efficiency, Aek Goti Village Office.*

Copyright (c) 2025 Salamah Ritonga

✉ Corresponding author :

Email Address : salamahritonga674@gmail.com

PENDAHULUAN

Konsep pemerintahan yang baik (good governance), masyarakat merupakan salah satu unsur yang harus saling terikat dengan pemerintah dan sektor swasta. Masalah yang ditemukan terkait perwujudan good governance adalah ketidakpercayaan publik akibat keterbatasan dan kelemahan pemerintah dalam manajemen yang memunculkan penyalahgunaan wewenang (abuse of power) aparatur pemerintah. Secara sederhana, governance merupakan proses lembaga-lembaga publik dalam mengatasi masalah-masalah publik, mengelola sumber daya publik, dan menjamin realisasi hak asasi manusia. Hakikat good governance yang esensial yaitu bebas dari penyalahgunaan wewenang dan korupsi serta dengan pengakuan hak berlandaskan pada pemerintahan hukum. Kondisi ideal yang

disebutkan di atas, terkait dengan pelayanan publik, kajian ini berusaha mengusungkan pemikiran mengenai pentingnya peran e-government yang mampu memangkas kegagalan-kegagalan pemerintahan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Konsep sistem elektronik sudah diakui efektivitasnya oleh pihak-pihak swasta, yang kemudian dirasa penting untuk diadopsi dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bersifat elektronis. Sistem elektronik ini dikenal dengan istilah *electronic government*. Tujuan dari tulisan ini, untuk melihat peranan e-government dalam penyelenggaraan pelayanan publik, di antaranya adalah: 1. Peran dan Fungsi Umum E-Government; 2. Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Pelayanan Publik; 3. Pelayanan Publik yang Efektif dan Komunikatif; dan 4. Penerapan E-Government: Mal Pelayanan Publik Kabupaten Sumedang. Secara umum e-government dapat dikatakan sebagai suatu aplikasi berbasis komputer dan internet yang digunakan untuk meningkatkan hubungan dan layanan pemerintah kepada warga masyarakatnya atau yang sering disebut dengan istilah G2C (*Government to Citizen*). Di samping itu juga hubungan antara pemerintah dengan perusahaan yang sering disebut G2B (*Government to Business*), bahkan terhadap pemerintah daerah atau negara lain yang sering disebut G2G (*Government to Government*) sebagai mitranya. "E-Government refers to the use by government agencies of information technologies (such as Wide Area Networks, the Internet, and mobile computing) that have the ability to transform relations with citizens, businesses, and other arms of government." (Indrajit, 2006).

Penjelasan tersebut dapat diartikan bahwa e-government merupakan setiap aktivitas yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi guna meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas pemerintah. (Indrajit, 2006) menyatakan definisi yang lebih mudah bahwa e-government merupakan penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah yang memungkinkan pemerintah untuk mentransformasikan hubungan dengan masyarakat, dunia bisnis dan pihak yang berkepentingan, dan dalam praktiknya e-government adalah penggunaan internet untuk melaksanakan urusan pemerintah dan penyediaan pelayanan publik agar supaya lebih baik dan berorientasi pada pelayanan masyarakat. Berbagai definisi di atas, dapat ditarik argumentasi bahwa e-government merupakan pemanfaatan teknologi informasi yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan hubungan dengan pihak-pihak dalam aspek *good governance* (masyarakat dan lembaga bisnis) dengan tujuan meningkatkan kualitas pelayanan yang efektif dan efisien.

Electronic Government sering digantikan Di tengah pesatnya inovasi teknologi informasi, membuat kehidupan saat ini dan yang akan datang makin kompetitif, terbuka, cepat, tepat dan berstandar tinggi. Hal tersebut telah berkembang menjadi „tuntutan“ global. Dunia bisnis telah melakukan respon dengan digitalisasi bisnis yang tidak saja berorientasikan pelayanan terbaik kepada konsumen, namun juga telah mengeksploitasi teknologi informasi sebagai sumber peningkatan profit yang berlipat ganda. Sementara itu, pemerintahan di banyak negara termasuk Indonesia, masih „loading“ untuk optimalisasi teknologi informasi dalam elektronikasi tata kelola pemerintahan (*e-government*). Menurut Sonny (2013) menyatakan bahwa kemajuan teknologi dan informasi dalam *egovernment* telah mempengaruhi pola manajemen dalam penyelenggaraan pemerintahan, baik dalam hubungannya antar institusi pemerintahan (*Government to Government*), masyarakat (*Government to Citizens*), dunia usaha (*Government to Business*), dan pegawai/karyawan (*Government to Employees*).

Kebijakan dan strategi tersebut juga telah diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *Egovernment* di seluruh jajaran pemerintahan secara menyeluruh. Penggunaan teknologi informasi dalam e-government menurut Parsaorantua et al. (2017) disinyalir menjanjikan efisiensi dan efektivitas bagi pemerintah dan masyarakat, kecepatan penyampaian informasi, jangkauan yang global, dan transparansi, serta menurut Nurita (2016) meningkatkan penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (*good governance*). Namun, implementasi e-government belum tersentralisir dengan baik ke seluruh jajaran pemerintahan di Indonesia.

Sejalan dengan pernyataan tersebut, Indonesia masih berada pada peringkat tujuh (7) berdasarkan E-government Development Index negara-negara ASEAN yang dibuktikan pada tabel berikut.

Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa penerapan *e-Government* dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik. Misalnya, penelitian oleh Enala dan Serano (2025) menunjukkan bahwa penerapan *e-Government* di Merauke telah berhasil memperbaiki sistem pelayanan publik berbasis teknologi informasi, yang berkontribusi pada peningkatan efisiensi dan transparansi pelayanan (Enala & Serano, 2025). Penelitian lain oleh Sari et al. (2025) di Desa Ungasan, Kabupaten Badung, mengungkapkan bahwa penerapan sistem *e-Government* dalam layanan administrasi desa berhasil meningkatkan pelayanan publik dengan lebih cepat dan akurat, serta mengurangi potensi kesalahan manusia dalam proses administrasi (Sari, Prabawati, & Lukman, 2025).

Selain itu, riset yang dilakukan oleh Rizky et al. (2025) juga menunjukkan bahwa penerapan *e-Government* di Indonesia dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik secara keseluruhan. Mereka menemukan bahwa dengan adanya sistem ini, masyarakat dapat mengakses layanan publik secara lebih mudah dan cepat, sementara pemerintah dapat mengurangi biaya operasional dan meningkatkan transparansi (Rizky et al., 2025).

Namun, meskipun penerapan *e-Government* memiliki potensi besar dalam meningkatkan efisiensi, keberhasilannya juga sangat dipengaruhi oleh kesiapan SDM pemerintah yang mengelola sistem tersebut. Nurkartika (2025) menyatakan bahwa transformasi menuju *e-Government* yang efektif memerlukan SDM yang terlatih dan kompeten agar dapat menjalankan tugas dengan baik dan memberikan pelayanan berkualitas tinggi (Nurkartika, 2025). Penelitian yang dilakukan oleh Adinda (2025) mengungkapkan bahwa penerapan aplikasi *SIDILAN* di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik. Pelatihan yang dilakukan kepada para pegawai mengenai penggunaan aplikasi ini berperan penting dalam memastikan efektivitas dan efisiensi layanan yang diberikan kepada masyarakat (Adinda, 2025). Dengan merujuk pada berbagai penelitian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh penerapan *e-Government* dan pelatihan SDM terhadap efisiensi pelayanan publik. Fokus penelitian ini adalah untuk memahami sejauh mana penerapan *e-Government* yang didukung oleh pelatihan yang memadai dapat meningkatkan efisiensi dalam pelayanan publik di berbagai instansi pemerintahan di Indonesia.

Tabel 1. E-government Development Index Negara ASEAN Tahun 2010-2020

| No. | Negara | Nilai Rata-Rata | | | | | |
|-----|-------------------|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | 2010 | 2012 | 2014 | 2016 | 2018 | 2020 |
| 1. | Singapura | 0.7476 | 0.8474 | 0.9076 | 0.8828 | 0.8812 | 0.9150 |
| 2. | Malaysia | 0.6161 | 0.6703 | 0.6115 | 0.6175 | 0.7174 | 0.7892 |
| 3. | Brunei Darussalam | 0.4796 | 0.6252 | 0.5042 | 0.5042 | 0.6923 | 0.7389 |
| 4. | Thailand | 0.4633 | 0.5093 | 0.4631 | 0.5522 | 0.6543 | 0.7565 |
| 5. | Filipina | 0.4637 | 0.5131 | 0.5152 | 0.5623 | 0.6708 | 0.7133 |
| 6. | Vietnam | 0.4454 | 0.5217 | 0.5775 | 0.7454 | 0.5931 | 0.6667 |
| 7. | Indonesia | 0.4026 | 0.4949 | 0.4487 | 0.4785 | 0.5281 | 0.6612 |
| 8. | Timor Leste | 0.2273 | 0.2922 | 0.3082 | 0.3126 | 0.3735 | 0.5113 |
| 9. | Kamboja | 0.2832 | 0.2920 | 0.3022 | 0.3343 | 0.3763 | 0.5113 |
| 10. | Myanmar | 0.2818 | 0.2303 | 0.1869 | 0.2362 | 0.3328 | 0.7892 |
| 11. | Laos | 0.2637 | 0.2593 | 0.3204 | 0.3578 | 0.4010 | 0.4697 |
| 12. | Asia Tenggara | 0.3828 | 0.4437 | 0.4744 | 0.4721 | 0.5094 | 0.6321 |
| 13. | Dunia | 0.4199 | 0.4882 | 0.4742 | 0.4922 | 0.5491 | 0.5988 |

Dalam penelitian yang dilakukan Rizka et al., (2010), yang berjudul analisis penerapan *website* dalam rangka *e-government* di kabupaten Tegal menyatakan bahwa Sumber daya

manusia ataupun kemampuan pegawai serta masyarakat pengguna pelayanan sangat mempengaruhi kesuksesan penerapan *e-government* pada suatu daerah. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Anggono (2006) yang berjudul pengaruh sumber daya manusia terhadap penerapan *e-government* pada kegiatan organisasi menyatakan bahwa sumber daya manusia tidak berpengaruh signifikan terhadap penerapan *e-government*. Junaedi (2005) dalam penelitiannya yang berjudul pengaruh teknologi informasi terhadap penerapan *e-government* pada lembaga departemen pemerintahan dan lembaga non-pemerintahan menyatakan bahwa teknologi informasi berpengaruh terhadap penerapan *e-government* pada lembaga departemen pemerintahan dan lembaga non pemerintahan. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Misbahuddin Azzuhri (2011) yang berjudul analisis keberhasilan penerapan *e-government* melalui optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi-komunikasi dan sumber daya manusia berkualitas. Menyatakan bahwa secara parsial variabel TIK tidak secara signifikan mempengaruhi variable keberhasilan penerapan *e-government*.

METODOLOGI

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian eksperimental yang bertujuan untuk menguji hubungan dan pengaruh antara penerapan *e-government*, pelatihan sumber daya manusia (SDM), dan efisiensi pelayanan kantor desa. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang sejauh mana penerapan teknologi *e-government* serta pelatihan yang diterima oleh aparatur desa dapat mempengaruhi kinerja dan efisiensi pelayanan di Kantor Desa Aek Goti, Kecamatan Silangkitang, Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Penelitian ini bersifat asosiatif, karena mencoba menguji hubungan antara variabel-variabel tersebut dan bagaimana interaksinya mempengaruhi efisiensi pelayanan. Dengan pendekatan kuantitatif, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan data yang objektif, sistematis, dan terukur mengenai pengaruh kedua faktor tersebut terhadap efisiensi pelayanan di kantor desa.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai dan aparatur yang terlibat dalam penerapan *e-government* dan pelatihan SDM di Kantor Desa Aek Goti, Kecamatan Silangkitang, Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Untuk menentukan sampel, peneliti menggunakan teknik *purposive sampling*, di mana hanya pegawai yang memiliki pengalaman langsung dalam implementasi *e-government* dan mengikuti pelatihan SDM yang dipilih sebagai sampel. Teknik ini dipilih agar penelitian dapat menilai secara tepat pengaruh kedua faktor terhadap efisiensi pelayanan. Metode pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner kepada sampel yang telah ditentukan, dengan menggunakan skala Likert untuk mengukur sejauh mana penerapan *e-government* dan pelatihan SDM berhubungan dengan peningkatan efisiensi pelayanan. Kuesioner terdiri dari beberapa indikator yang terkait dengan masing-masing variabel, di antaranya: penerapan sistem *e-government*, kualitas pelatihan SDM, serta aspek efisiensi pelayanan seperti waktu proses, kepuasan masyarakat, dan kecepatan pelayanan.

Setelah data terkumpul, analisis data akan dilakukan menggunakan teknik analisis regresi berganda untuk mengetahui pengaruh simultan penerapan *e-government* dan pelatihan SDM terhadap efisiensi pelayanan. Analisis regresi berganda dipilih karena dapat menguji lebih dari satu variabel independen dan melihat dampaknya secara bersamaan terhadap variabel dependen. Sebelum itu, dilakukan uji normalitas untuk memastikan data berdistribusi normal dan uji multikolinearitas untuk memastikan tidak ada hubungan yang terlalu kuat antar variabel independen. Selain itu, uji validitas dan reliabilitas kuesioner juga akan dilakukan untuk memastikan bahwa instrumen pengumpulan data yang digunakan valid dan dapat diandalkan. Pengujian hipotesis dilakukan dengan uji t untuk mengukur pengaruh masing-masing variabel independen terhadap efisiensi pelayanan, serta uji F untuk menguji pengaruh simultan antara kedua variabel independen terhadap variabel dependen. Dengan demikian, hasil analisis diharapkan memberikan kesimpulan yang jelas

tentang pengaruh penerapan e-government dan pelatihan SDM terhadap efisiensi pelayanan di Kantor Desa Aek Goti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengujian Validitas dan Reliabilitas

Pengujian instrumen penelitian diketahui nilai signifikansi untuk semua butir pertanyaan memiliki *level of significance* lebih kecil dari 0,05 sehingga instrumen penelitian untuk ini valid dan memenuhi syarat untuk diolah lebih lanjut sebagai instrumen penelitian. Dan nilai *Cronbach's Alpha* dari masing-masing variabel penelitian lebih dari 0,5, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa pertanyaan-pertanyaan yang digunakan untuk menyusun variabel- variabel tersebut adalah reliabel.

Tabel 2. Rekapitulasi Hasil Uji Validitas Variabel *E- Government*

| Item Pertanyaan | Koefisien Korelasi | Sig. | Ket. |
|-----------------|--------------------|-------|-------|
| P1 | 0,556 | 0.000 | Valid |
| P2 | 0.684 | 0.000 | Valid |
| P3 | 0.612 | 0.000 | Valid |
| P4 | 0.610 | 0.000 | Valid |
| P5 | 0.660 | 0.000 | Valid |
| P6 | 0.699 | 0.000 | Valid |
| P7 | 0.649 | 0.000 | Valid |
| P8 | 0.738 | 0.000 | Valid |
| P9 | 0.581 | 0.000 | Valid |
| P10 | 0.629 | 0.000 | Valid |
| P11 | 0.580 | 0.000 | Valid |
| P12 | 0.687 | 0.000 | Valid |
| P13 | 0.625 | 0.000 | Valid |
| P14 | 0.698 | 0.000 | Valid |
| P15 | 0.624 | 0.000 | Valid |

Dari tabel dapat diketahui nilai signifikansi untuk semua butir pertanyaan memiliki *level of significance* lebih kecil dari 0,05 sehingga instrumen penelitian untuk variabel *E-Government* ini valid dan memenuhi syarat untuk diolah lebih lanjut sebagai instrumen penelitian.

Tabel 3. Rekapitulasi Hasil Uji Reliabilitas Instrumen Penelitian

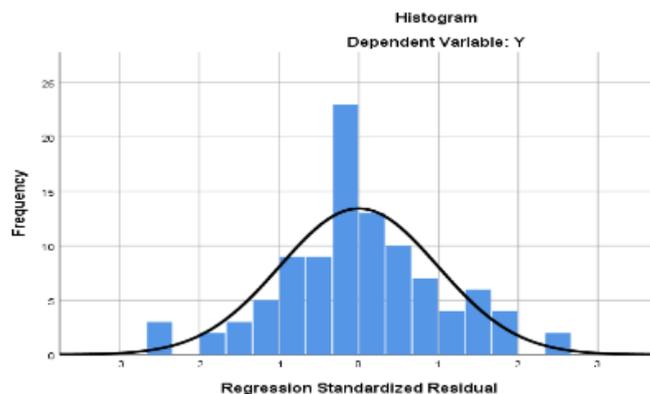
| Variabel | <i>Cronbach Alpha</i> | Keterangan |
|------------------------------------|-----------------------|------------|
| Penerapan E-Government (X1) | 0,779 | Reliabel |
| Pelatihan Sumber Daya Manusia (X2) | 0,809 | Reliabel |
| <i>Efisiensi Pelayanan</i> (Y) | 0,812 | Reliabel |

Sumber: Output SPSS

Berdasarkan hasil pengujian pada table diketahui nilai *Cronbach's Alpha* untuk variabel Penerapan E-Government adalah sebesar 0,779, variabel pelatihan sumber daya manusia sebesar 0,809, dan efisiensi pelayanan sebesar 0,812. Nilai *Cronbach's Alpha* dari masing-masing variabel penelitian lebih dari 0,5, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa pertanyaan-pertanyaan yang digunakan untuk Menyusun variabel-variabel tersebut adalah reliabel.

Uji Normalitas Data

Hasil uji normalitas data dengan analisis grafik uji normalitas histogram dapat ditunjukkan pada gambar berikut:



Gambar 1. Grafik Uji Normalitas Histogram

Pada gambar diatas dapat disimpulkan bahwa grafik histogram menunjukkan pola distribusi normal.

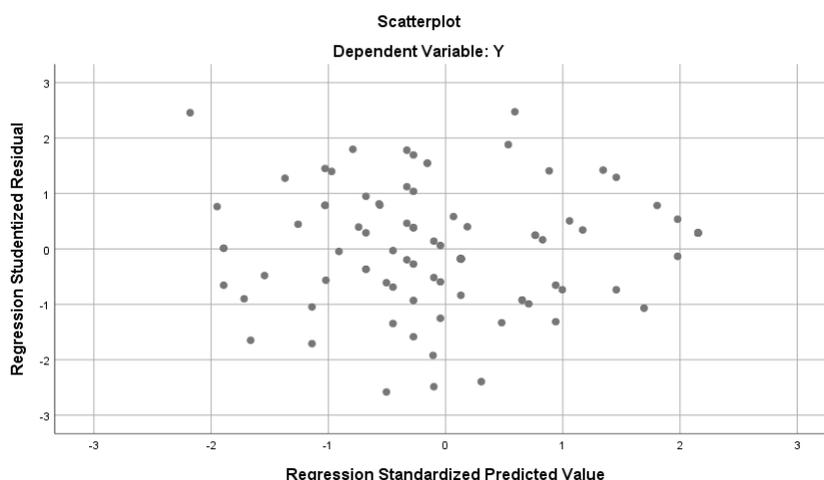
Uji Multikolinieritas

Tabel 4. Rekapitulasi Hasil Uji *Multikolinieritas*

| Variabel | VIF | Keterangan |
|-------------------------------|-------|-------------------------------|
| Penerapan e-government (X1) | 2.152 | <i>Non- Multikolinieritas</i> |
| Pelatihan Sumber Daya Manusia | 2.152 | <i>Non- Multikolinieritas</i> |

Dari table diatas, hasil uji multikolinieritas menunjukkan Nilai **Variance Inflation Factor (VIF)** untuk kedua variabel dalam penelitian ini, yaitu **Penerapan e-Government (X1)** dan **Pelatihan Sumber Daya Manusia**, masing-masing sebesar **2.152**, yang menunjukkan bahwa tidak terdapat masalah **multikolinieritas** antara kedua variabel tersebut. VIF yang lebih kecil dari 10 menunjukkan bahwa kedua variabel independen ini tidak saling berkorelasi secara signifikan, sehingga keduanya dapat dimasukkan dalam model regresi tanpa memengaruhi kestabilan atau akurasi estimasi koefisien regresi. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinieritas yang berarti dalam model ini, dan hasil analisis regresi yang melibatkan kedua variabel ini dapat diandalkan.

Uji Heterokedastisitas



Gambar 2. Uji Heterokedastisitas

Dari gambar diatas, ini terlihat titik-titik menyebar secara acak, tidak membentuk pola tertentu yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas ataupun dibawah angka 0 (nol) pada sumbu Y. Hal ini berarti tidak terjadi *heterokedastisitas* pada model regresi, sehingga model regresi layak dipakai untuk memprediksi kinerja individu berdasarkan masukan

variabel independennya yaitu penerapan e-government dan pelatihan sumber daya manusia.

Pengujian hipotesis

Tabel 5. Ringkasan Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

| Variabel | Koefisien Regresi | Stand. Error | t-hitung | t-tabel | Sig. |
|----------|-------------------|--------------|----------|---------|-------|
| X1 | 0,370 | 0,088 | 4.197 | 1,984 | 0.000 |
| X2 | 0,489 | 0,083 | 5.878 | 1,984 | 0,000 |

Berdasarkan analisis regresi linier berganda seperti yang ditunjukkan pada tabel diatas, dapat dirumuskan suatu persamaan regresi linier berganda sebagai berikut: $Y = 3,096 + 0,370X_1 + 0,489X_2 + e$. Dari persamaan tersebut dapat diketahui besarnya konstanta yaitu sebesar 2,362. Hal ini menyatakan bahwa jika tidak terdapat variabel independen maka besarnya penerapan *e-government* perusahaan adalah 3,096. Koefisien korelasi penerapan e-government (X1) bertanda positif sebesar 0,370 menyatakan bahwa kenaikan sebesar 1% penerapan *e-government* akan menyebabkan kenaikan *e-government* sebesar 63%, sedangkan variabel lain diasumsikan tetap. Hal ini berarti bahwa semakin besar penerapan *e-government* maka semakin besar pula penerapan *e-government*. koefisien penerapan sumber daya manusia (X2) bertanda positif sebesar 0,489, menyatakan bahwa kenaikan 1% sumber daya manusia akan menyebabkan kenaikan penerapan *e-government* sebesar 51,1%, sedangkan variabel lain diasumsikan tetap. Hal ini berarti bahwa semakin besar sumber daya manusia maka semakin besar pula penerapan *e-government*.

Tabel 5. Hasil Uji R Square

| Konstanta | F hitung | F tabel | R | R ² | Sig. |
|-----------|----------|---------|-------|----------------|-------|
| 3,096 | 94,987 | 3,09 | 0,814 | 0,662 | 0,015 |

Berdasarkan analisis uji t dapat diketahui besarnya koefisien determinasi $R^2 = 0,814$, hal ini menunjukkan bahwa perubahan yang terjadi pada penerapan *e-government* sebesar 81,4% dipengaruhi oleh penerapan e-government dan pelatihan sumber daya manusia, sedangkan sisanya yaitu 66,2% dipengaruhi oleh variabel lain. Dari table di atas hasil hipotesis pertama menunjukkan tingkat signifikansi 0,00 lebih kecil dari 0,05 ($< 0,05$) sehingga variabel teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerapan *e-government*. Hipotesis yang kedua menunjukkan tingkat signifikansi 0,00 lebih kecil dari 0,05 sehingga variabel sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerapan *e-government*.

Pembahasan

Pengaruh Teknologi Informasi Terhadap Penerapan E-Government

Penelitian ini menemukan bahwa t hitung variabel teknologi informasi (X1) adalah sebesar 2,058 sedangkan nilai t tabel adalah sebesar 2,045. Nilai t hitung lebih besar dibandingkan nilai t tabel, dan nilai signifikansi adalah 0,049 yaitu lebih kecil jika dibandingkan dengan $\alpha = 5\%$ dan dari model persamaan diketahui bahwa koefisien regresi adalah 0,567 dan memiliki nilai positif. Hal ini berarti H_0 ditolak dan H_1 diterima, dan membuktikan bahwa secara parsial variabel teknologi informasi (X1) mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap penerapan *e-government* sebagai bentuk pelayanan publik.

Hasil penelitian ini sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Albarda (2006) yang menyatakan bahwa implementasi teknologi informasi dalam kegiatan organisasi, baik itu dalam bentuk perusahaan atau organisasi publik / pemerintahan dan dalam bentuk skala kecil maupun skala besar memberikan positif yang signifikan. Selain itu hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Junaedi (2005) yang

menerangkan bahwa teknologi informasi yang berbasis komputer merupakan alat atau media utama dalam menerapkan dan mengembangkan *e-government*. Keberhasilan implementasi *e-government* digunakan untuk mengakselerasi peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Dalam meningkatkan pelayanan publik kantor desa aek goti kecamatan silangkitang selalu memperbaharui informasi setiap saat, memakai perangkat keras dan perangkat lunak yang sesuai untuk pemrosesan informasi yang efektif agar pemakai mengetahui dan puas terhadap sistem informasi, serta memberikan jaminan keamanan penetapan *e-government* seperti sistem pengamanan (*security system*) yang melekat pada pelayanan desa aek goti. Kecanggihan infrastruktur teknologi informasi menjadi tolak ukur keberhasilan dalam penerapan *e-government*.

Penlatihan Sumber Daya Manusia Terhadap Penerapan E-Government

Dari tabel diatas terlihat bahwa t hitung variabel pelatihan sumber daya manusia (X_2) adalah sebesar 0,489 sedangkan t tabel adalah sebesar 1,984. Nilai t hitung lebih besar dibandingkan nilai t tabel, dan nilai signifikansi adalah 0,000 yaitu lebih kecil jika dibandingkan dengan $\alpha = 5\%$ dan dari model persamaan diketahui bahwa koefisien regresi adalah 0,489 dan memiliki nilai positif. Hal ini berarti H_0 ditolak dan H_1 diterima, dan membuktikan bahwa secara parsial variabel sumber daya manusia (X_2) mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap penerapan *e-government* sebagai bentuk pelayanan publik. Hasil penelitian ini didukung oleh Misbahuddin Azzuhri (2011) yang menyatakan bahwa variabel kualitas sumber daya manusia dalam mendesain dan mengelola mempengaruhi keberhasilan penerapan *e-government* secara parsial, hal ini disebabkan oleh website mudah dipahami dan dapat diakses dengan mudah, serta membantu pegawai dalam aktivitas pekerjaan

Berdasarkan data yang diperoleh dari berbagai penelitian yang relevan, dapat disimpulkan bahwa penerapan *e-government* memiliki dampak yang signifikan terhadap efisiensi pelayanan publik di tingkat pemerintahan desa. Penelitian yang dilakukan oleh Hamim et al. (2024) menunjukkan bahwa implementasi *e-government* di Desa Sukajaya meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik. Hal ini sejalan dengan penelitian lainnya yang mengindikasikan bahwa penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan publik dapat meningkatkan kualitas dan transparansi pelayanan, yang berkontribusi terhadap tercapainya pelayanan yang lebih efisien dan efektif. Pertiwi et al. (2021) dalam penelitiannya tentang penerapan *e-government* di Desa Bulu Timoreng, menemukan bahwa *e-government* berperan penting dalam mewujudkan transparansi dalam tata kelola pemerintahan desa. Hal serupa juga ditemukan oleh Adillah et al. (2024) yang memaparkan bahwa website smart desa digital di Desa Tegal Angus dapat meningkatkan kualitas layanan informasi publik melalui sistem berbasis digital yang lebih efisien dan mudah diakses oleh masyarakat. Penggunaan sistem informasi yang efektif mendukung percepatan proses administrasi desa, yang berkontribusi pada efisiensi pelayanan publik.

Dalam konteks pelatihan sumber daya manusia (SDM), Syuhada et al. (2024) menyatakan bahwa pengembangan SDM melalui pelatihan teknis yang berkaitan dengan sistem informasi pemerintahan daerah (SIPD) mampu mempercepat proses administrasi di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sumatera Selatan. Dengan adanya pelatihan yang memadai, aparatur desa dapat mengoptimalkan penerapan *e-government* yang lebih efisien. Hal ini didukung oleh penelitian Sari et al. (2025) yang menekankan bahwa pelatihan bagi pegawai dalam penggunaan sistem informasi seperti Sistem Informasi Layanan Administrasi Desa Ungasan (Silagas) dapat mempercepat pelayanan administrasi di Desa Ungasan, Kabupaten Badung, Bali.

Selain itu, Auliandini (2024) dalam penelitiannya mengenai penerapan aplikasi Simpeldesa di Desa Ciburuy, Kabupaten Bandung Barat, menemukan bahwa aplikasi berbasis *e-government* ini dapat meningkatkan efisiensi layanan administrasi desa, dan memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan secara lebih cepat. Angganten (2024) juga menambahkan bahwa penerapan *e-government* dalam mendukung transparansi dan

keterbukaan informasi publik di Desa Tapak, Kabupaten Magetan, dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Secara keseluruhan, penelitian-penelitian tersebut menunjukkan bahwa penerapan e-government dan penguatan kapasitas SDM melalui pelatihan sangat mempengaruhi peningkatan efisiensi pelayanan di pemerintahan desa. Teknologi informasi memungkinkan pelayanan yang lebih cepat, lebih transparan, dan lebih mudah diakses oleh masyarakat, sementara pengembangan SDM membantu memastikan bahwa sistem yang diterapkan dapat berfungsi secara optimal. Dengan demikian, hasil penelitian ini memberikan gambaran bahwa kedua faktor tersebut saling mendukung dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di tingkat pemerintahan desa.

SIMPULAN

Berdasarkan data dan hasil analisis dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa penerapan e-government dan pelatihan sumber daya manusia (SDM) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap efisiensi pelayanan di Kantor Desa Aek Goti, Kecamatan Silangkitang, Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Berdasarkan hasil uji validitas dan reliabilitas, instrumen penelitian terbukti valid dan reliabel, yang menunjukkan bahwa data yang dikumpulkan dapat dipercaya untuk digunakan dalam analisis lebih lanjut. Hasil uji regresi linier berganda menunjukkan bahwa kedua variabel independen, yaitu penerapan e-government (X1) dan pelatihan SDM (X2), memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap efisiensi pelayanan. Dari analisis, koefisien regresi untuk penerapan e-government (X1) sebesar 0,370 menunjukkan bahwa peningkatan penerapan e-government dapat meningkatkan efisiensi pelayanan secara signifikan. Begitu juga dengan pelatihan SDM (X2), dengan koefisien regresi sebesar 0,489, yang menunjukkan bahwa peningkatan kualitas pelatihan SDM akan berpengaruh positif terhadap efisiensi pelayanan.

Hasil uji t untuk masing-masing variabel menunjukkan bahwa nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, yang berarti kedua hipotesis penelitian diterima. Ini mengindikasikan bahwa penerapan e-government dan pelatihan SDM memiliki pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan efisiensi pelayanan di kantor desa. Selain itu, hasil uji R² menunjukkan bahwa sekitar 81,4% perubahan efisiensi pelayanan dipengaruhi oleh penerapan e-government dan pelatihan SDM, sementara sisanya dipengaruhi oleh faktor lain. Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan pentingnya penerapan teknologi informasi dalam bentuk e-government serta pengembangan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan untuk meningkatkan efisiensi pelayanan publik. Hal ini juga menunjukkan bahwa penerapan e-government yang didukung oleh SDM yang terlatih dapat memberikan dampak positif dalam meningkatkan kinerja pelayanan di sektor pemerintahan desa.

Referensi :

- Adillah, M. N., Murodi, A., & Muhtadi, Y. (2024). Implementasi E-Government Pada Layanan Informasi Publik Berbasis Website Smart Desa Digital Di Desa Tegal Angus Kecamatan Teluknaga. *Mimbar Administrasi Fisip Untag Semarang*, 21(2), 244-256.
- Adinda, D. P. (2025). Pengaruh Penerapan E-Government Terhadap Kualitas Pelayanan Publik Melalui Aplikasi Sidilan Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat. *Jurnal Praxis Idealis: Jurnal Mahasiswa Ilmu Pemerintahan*, 2(1).
- Angganten, T. A. (2024). Penerapan E-Government Guna Mendukung Transparansi Dan Keterbukaan Informasi Publik Di Desa Tapak Kabupaten Magetan. *Jurnal Sosial Humaniora*, 1(2), 220-229.
- Aris, M. S., Tambunan, E., Putri, D. E. K., & Nugraha, X. (2022). Penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Lembaga Pemasarakatan. *Jurnal Litigasi*, 23(2), 253-271.
<https://doi.org/10.23969/Litigasi.V23i2.5077>

- As'ad, A., Brasit, N., Muis, M., & Umar, F. (2023, May). How Leadership Style, Commitment, Work Climate, and Work Motivation Affect on Satisfaction and Performance. In 7th International Conference on Accounting, Management and Economics (ICAME-7 2022) (pp. 546-563). Atlantis Press.
- As'ad, A., Tiong, P., & Sani, A. (2022). Analisis Implementasi Budaya Organisasi dalam meningkatkan Kinerja Karyawan melalui Motivasi Kerja dan Kepuasan Kerja: Study Empirik Beberapa Café di kota Makassar. *Amkop Management Accounting Review (AMAR)*, 2(1), 51-62.
- As'ad, A. (2020). Pengaruh Motivasi dan Kompetensi terhadap Produktivitas Kerja Karyawan. *YUME: Journal of Management*, 3(2).
- Auliandini, A. S. (2024). Implementasi E-Government Berbasis Aplikasi Simpeldesa Dalam Sistem Pelayanan Di Desa Ciburuy Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat. *Jurnal Praxis Idealis: Jurnal Mahasiswa Ilmu Pemerintahan*, 1(1).
- Badawi, A. I., & Prawitno, A. (2022). Penerapan E-Government Melalui Whistleblowing System (Wbs) Dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Di Kabupaten Bulukumba. *Matra Pembaruan Jurnal Inovasi Kebijakan*, 6(1), 69-81. <https://doi.org/10.21787/MP.6.1.2022.69-81>
- Enala, S. H., & Serano, V. R. (2025). Penerapan e-Government di Merauke: Studi Kasus Sistem Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi. *Papsel Journal of Humanities and Policy*, 2(1), 74-81.
- Fahmi, J. (2023). Nilai Pelayanan Publik Sidoarjo Tertinggi Kedua Se Jatim. Radio Republik Indonesia. <https://www.rri.co.id/daerah/201164/NilaiPelayanan-Publik-Sidoarjo-Tertinggi-Kedua-Se-Jatim>
- Hafel, M., Jamil, J., Umasugi, M., & Anfas, A. (2022). Challenges Of Egovernment Implementation In The Region Archipelago Characteristics. *Jakpp (Jurnal Analisis Kebijakan & Pelayanan Publik)*, 8(1), 44-58. <https://doi.org/10.31947/jakpp.v8i1.21282>
- Hamim, R. N., Meidiana, A., Helmi, C., & Nurdin, N. (2024). Dampak Implementasi E-Government Terhadap Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan Publik Di Desa Sukajaya. *Indonesian Journal Of Public Administration Review*, 1(3), 16-16.
- Muliawaty, L., & Hendryawan, S. (2020). Peranan E-Government Dalam Pelayanan Publik (Studi Kasus: Mal Pelayanan Publik Kabupaten Sumedang). *Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi*, 11(2), 45-57.
- Nurkartika, N. (2025). E-Goverment Transformasi Menuju Good Goovernance. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 3(1), 1-10.
- Pertiwi, A., Dema, H., Mustanir, A., & Anugrah, E. (2021). Penerapan E-Government Dalam Mewujudkan Transparansi Tata Kelola Pemerintahan Desa (Studi Pada Pemerintahan Desa Bulu Timoreng). *Praja: Jurnal Ilmiah Pemerintahan*, 9(3), 130-139.
- Rifdan & Herman (2023). Efektifitas Dan Efisiensi Penyelenggaraan E-Government Pada Pelayanan Publik Di Kota Pare-Pare
- Rizky, A. M., Pratiwi, M. P., Chairunnisa, A., Aiko, I. A., & Ariesmansyah, A. (2025). E-Goverment: Meningkatkan Efisiensi dan Efektivitas Pelayanan Publik di Indonesia. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 5(1), 2070-2089.
- Sari, N. M. P., Prabawati, N. P. A., & Lukman, J. P. (2025). Penerapan E-Government Sistem Informasi Layanan Administrasi Desa Ungasan (Silagas) Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik Di Desa Ungasan Kabupaten Badung. *Socio-Political Communication And Policy Review*.
- Sari, N. M. P., Prabawati, N. P. A., & Lukman, J. P. (2025). Penerapan E-Government Sistem Informasi Layanan Administrasi Desa Ungasan (Silagas) dalam Meningkatkan Pelayanan Publik di Desa Ungasan Kabupaten Badung. *Socio-political Communication and Policy Review*.
- Suprapti, S. (2024). *Peran Inovasi Dalam Memediasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Implementasi E-Government Terhadap Kinerja Sumber Daya Manusia Di Lingkungan Pemerintah Kecamatan Ungaran Timur* (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Sultan

Agung Semarang).

Syuhada, F. F., Julian, C., Iriani, A., Chairani, A. L., & Austin, T. (2024). Transformasi E-Government Melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Sipd) Di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sumatera Selatan. *Jurnal Sikap (Solusi Ilmiah Kebijakan Dan Administrasi Publik)*, 12(02), 7-14.

Warkentin, M., & Gefen, D. (2002). Masalah Keamanan Dan Privasi Dalam E-Government

Yusuf Amrozi, Nurul Aini, Zuyinatul Munadhiroh (2022). Peta Perkembangan E-Government Di Indonesia. *Jurnal Sistem Informasi*, Vol 14, No 1.